



# Buletin Parlamentaria

Nomor 1019/I/VIII/2018 • Agustus 2018



## DPR Peduli Korban Gempa Lombok



Komisi V Pastikan Kesiapan Infrastruktur Asian Games di Palembang

# DPR Peduli Korban Gempa Lombok



Foto: Rumi/hr

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama Tim meninjau lokasi gempa Lombok, NTB

**Gempa bumi berkekuatan 6,4 Skala Richter dengan kedalaman 24 km mengguncang Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Minggu (29/7). Bencana alam ini mengakibatkan 17 orang tewas, 300 lebih warga terluka, serta menimbulkan kerusakan fisik parah pada ribuan bangunan rumah, gedung fasilitas publik dan perkantoran. DPR RI pun berempati dan peduli akan korban gempa Lombok.**

Kepedulian itu ditunjukkan dengan pemberian bantuan sebesar Rp380 juta serta sejumlah bahan pokok dan selimut dari Pimpinan DPR RI dan sejumlah Anggota DPR RI kepada korban gempa. Sumbangan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dengan didampingi Anggota DPR RI Lalu Gede Syamsul Mujahidin (F-Hanura), Muhammad Syafruddin (F-PAN) dan Willgo Zainar (F-Gerindra).

“Kami Pimpinan dan Anggota DPR RI memberikan sumbangan yang berasal dari gaji dan tunjangan, untuk membantu warga korban gempa. Kami berharap bantuan ini untuk digunakan sebaik-baiknya,” kata Fahri saat menyerahkan bantuan kepada Kepala Desa Obel-Obel Harun, di Posko Pengungsian SDN 1 Obel-Obel,

Kecamatan Sambelia, Lombok Timur, NTB, Rabu (1/8).

Bantuan ini, lanjut politisi dapil NTB itu, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh warga korban gempa. Tak hanya itu, ia pun memberikan motivasi agar masyarakat dapat melewati cobaan tersebut, dan tak mengalami trauma dan kesedihan terus-menerus. Menurutnya, musibah ini harus menjadi bahan untuk lebih optimis ke depannya.

“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memulihkan kesehatan jiwa atau trauma dari korban gempa, karena bencana tersebut terasa cukup besar hingga memporak-porandakan rumah menjadi hancur. Untuk itu kita masih bersyukur bencananya terjadi pada pagi hari, tidak terjadi pada malam hari, saat kita berada di rumah atau tidur,” tandas Fahri.

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat itu meminta kepada semua pihak yang membantu dalam mengevakuasi para korban, untuk memberikan penanganan khusus kepada anak. Ia meminta anak-anak mendapat perlakuan khusus pada makanan. Menurutnya, pihak-pihak yang memberi sumbangan juga harus memahami kebutuhan anak-anak.

Sementara terkait janji Presiden Joko Widodo yang akan membantu pembangunan rumah warga yang mengalami rusak berat akibat gempa itu, Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar berharap dana bantuan pembangunan ini segera terealisasi. “Kita berharap pemerintah bisa cepat merealisasikannya

agar pembangunannya bisa cepat dan masyarakat bisa kembali hidup normal lagi,” kata Willgo yang turut serta dalam peninjauan.

Politisi Partai Gerindra itu meminta agar fasilitas air bersih untuk air minum, MCK dan lainnya untuk para korban gempa yang tinggal sementara di posko pengungsian bisa diperhatikan. Sehingga kesehatan mereka juga tetap bisa terjaga. “Kemudian makanan juga penting diperhatikan. Walau itu makanan siap saji, namun harus yang mengandung gizi yang baik dan memadai,” pesan politisi dapil NTB itu.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Syafrudin (F-PAN) meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan fasilitas ibadah dan dapur umum bagi masyarakat korban gempa Lombok.

“Saya meminta kepada bapak bupati terpilih dan semua pihak agar berkonsultasi dengan pemerintah agar segera memberikan tempat yang layak untuk beribadah ataupun dapur umum bagi masyarakat yang tertimpa musibah, agar diberikan kemudahan beraktivitas,” harap politisi dapil NTB itu. ■ rni/sf



# Fadli Zon Bahas Demokrasi Indonesia dengan USINDO

**Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon beraudiensi dengan United States-Indonesia Society (USINDO) di Ruang Pimpinan DPR RI, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7). Dalam pertemuan itu, tercipta diskusi mengenai perkembangan politik dan demokrasi Indonesia serta tugas dan fungsi DPR RI.**

“Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, merupakan negara yang melakukan pemilihan umum secara langsung terbesar di dunia. Bahkan mengalahkan India dan Amerika Serikat,” kata Fadli saat memulai diskusi dihadapan seluruh peserta audiensi.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pada April 2019 mendatang, masyarakat Indonesia akan menjalani Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak. Menurutnya, ini akan menjadi hari yang besar bagi demokrasi Indonesia. Bahkan untuk Pileg di tingkat kota/kabupaten, provinsi dan DPR RI, ada sekitar 26 ribu bakal calon legislatif.

“Kami menyebut tahun 2018 ini dan tahun 2019 mendatang sebagai tahun politik, karena sebagian masyarakat Indonesia baru menjalani Pilkada Serentak di sejumlah daerah, Juni lalu, khususnya di Pulau Jawa,” imbuh Fadli.

Fadli mengaku sangat senang mendapatkan kunjungan dari teman-teman USINDO. Sejauh ini, menurut Fadli, USINDO telah melakukan pertukaran bilateral di bidang pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat.

“Terima kasih atas kunjungan teman-teman USINDO ke DPR RI. Semoga ke depan USINDO terus memperkuat hubungan bilateral di bidang pendidikan antara Indonesia dan Amerika Serikat,” harap politisi dapil Jawa Barat itu. ■ sf



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)  
**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)  
**REDAKTUR**  
Sofyan Efendi  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Hasri Mentari, Guntur Dewanto  
**ANGGOTA REDAKSI**  
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske  
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,  
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias  
**FOTOGRAFER**  
Soepardi, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,  
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,  
Azka Restu Fadilah  
**ADMINISTRASI**  
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher, Gerald Opie  
**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

## PENERBITAN

**PIMPINAN PENERBITAN**  
Drs. Sunardi, M.M (Kabag Penerbitan)  
**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)  
**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen  
**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito  
**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurrahman, Abdul Kahfi, S. Kom,  
**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)  
**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna  
**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima audiensi United States-Indonesia Society (USINDO)

Foto: Geraiid/hr



Foto: Jaka/hr

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana TNI Angkatan Laut.

## Bambang Soesatyo Jadi Warga Kehormatan TNI Angkatan Laut

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menerima penyematan Brevet Kehormatan Hiu Kencana TNI Angkatan Laut. Penyematan ini sebagai tanda diangkatnya Bamsoet menjadi warga kehormatan TNI Angkatan Laut. Bamsoet, panggilan akrab Ketua DPR RI itu dipilih karena memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembinaan kapal selam sebagai salah satu senjata strategis Sistem Senjata Armada Terpadu.**

“ Bagi saya merupakan kehormatan besar menjadi warga kehormatan TNI AL. Brevet Hiu Kencana yang disematkan di dada saya menjadi penyemangat juang untuk selalu mengabdikan kepada Tanah Air tercinta, sebagaimana yang selalu ditunjukkan oleh para prajurit TNI di lapangan,” ujar Bamsoet saat penyematan Brevet Hiu Kencana di dalam Kapal Selam Ardadadeli dengan kedalaman 250 meter di dasar bawah laut dari Pangkalan Komando Lintas Laut Militer Tanjung Priok, Jakarta, Senin (30/7).

Bagi Politisi Partai Golkar ini, penyematan brevet tersebut memberikan semangat tambahan bagi dirinya pribadi maupun bagi DPR RI untuk berkolaborasi lebih baik lagi dengan TNI Angkatan Laut. Khususnya, dalam mendukung pemerintahan Presiden Jokowi menjadikan

Indonesia sebagai poros maritim dunia. Di samping mengimplementasikan kebijakan pemerintah mencapai kemandirian industri pertahanan.

“Saya akan pastikan DPR RI senantiasa berpartisipasi dan berkontribusi bagi perkembangan TNI Angkatan Laut, khususnya dalam pengembangan satuan kapal selam. Jika selama ini politik anggaran terhadap kekuatan laut kita agak terabaikan, di APBN mendatang hal tersebut harus lebih baik lagi,” tegas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini memandang pentingnya terus menggelorakan doktrin kekuatan maritim. Hal ini sejalan dengan arah pembangunan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang menggagas kembali kejayaan Bangsa Indonesia sebagai negara maritim.

“Kedaulatan kita di laut seharusnya

bukan hanya terletak pada *sea power* yang mengacu pada kontrol menyeluruh atas lautan saja, melainkan juga pada *naval power* yang mengacu kepada angkatan bersenjata yang terorganisasi di lautan. Karena itu, menguatkan pertahanan Indonesia harus dimulai dengan menguatkan armada TNI Angkatan Laut. Idealnya, untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI, Indonesia sekurangnya membutuhkan 16-18 armada kapal selam modern. Saat ini kita baru memiliki 5 armada kapal selam. Dua unit Terakhir dari Korea Selatan dan satu unit lagi dalam penyelesaian di PT PAL Surabaya,” jelas Bamsoet.

Ketua Badan Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI) ini menjelaskan, sejak berabad silam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia telah berorientasi ke laut. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai pelaut ulung yang sanggup mengarungi lautan lepas hingga Madagaskar. Laut bagi bangsa Indonesia bukan semata wilayah perairan, melainkan juga menjadi kekuatan utama sekaligus sumber kehidupan.

“Kita bukan bangsa lemah yang bisa dengan mudah ditelan ombak. Kita adalah bangsa yang kuat dengan jiwa Cakrabakti Samudra, yakni jiwa pelaut yang tak gentar mengarungi samudra dan menghadang gelombang menjulang,” pungkas Bamsoet.

Selain Bamsoet, Brevet Kehormatan Hiu Kencana juga disematkan kepada 10 orang lainnya yang dianggap berkontribusi kepada TNI AL khususnya Satuan Kapal Selam. Mereka adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Moermahadi Soerja Djanegara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Soemantri Brodjonegoro.

Kemudian, Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, Anggota I BPK Agung Firman Sampurna, Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staff Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Yuyu Sutisna, Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Yudo Margono, Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Didik Setiyono, Panglima Komando Armada III Laksamana TNI I N. G. Ariawan. ■ es/sf

# Utut Adianto Terima Kunjungan Bupati Biak Numfor

**Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan Bupati Biak Numfor Herry Naap beserta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Dari kunjungan tersebut, Utut mendapatkan informasi terkait beberapa hal yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat Biak Numfor.**

“Tugas kami di DPR ini adalah melakukan pengawasan dan mengingatkan menteri-menteri yang membantu Presiden agar mereka terus mendukung program yang dicanangkan Presiden. Sesekali nanti menteri-menteri terkait dengan permasalahan yang terjadi di Biak Numfor untuk berkunjung ke sana,” ujar Utut saat menerima kunjungan Bupati Biak Numfor di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/7).

Terhadap pelayanan kepada masyarakat, politisi PDI-Perjuangan ini mengatakan kepada Bupati Biak Numfor agar berpikir dari hulu ke hilir. Ia mencontohkan, Bupati sebaiknya mempermudah pengurusan tanah-tanah yang akan dijadikan sarana pelayanan publik.

“Sementara terkait masalah kesehatan di Biak Numfor, nanti saya akan mendorong Menteri Kesehatan agar mengirim tenaga dokter yang akan mengisi tiap-tiap puskesmas di sana,” ucap Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Bidang Urusan Rumah Tangga (BURT).

Ia juga menambahkan, bahwasanya penyakit di desa biasanya terkait infeksi, permasalahan gizi, hingga kecelakaan kerja. Untuk itu, politisi daerah pemilihan Jawa Tengah itu mendorong Bupati dan Kepala Dinas terkait harus pro aktif mensosialisasikan dan memanfaatkan Kartu Indonesia Sehat – Jaminan Kesehatan Nasional (KIS-JKN). Begitu pula dengan Program Keluarga Harapan (PKH), semua informasi harus sampai ke masyarakat tingkat bawah.



Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menerima kunjungan Bupati Biak Numfor Herry Naap.

Foto: Rumi/hr

Di sektor pariwisata kepada Bupati Biak Numfor, Utut menyampaikan cita-cita Presiden Jokowi yang ingin menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang pemasukan negara terbesar kedua setelah pajak. Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah mendukung dengan cara mempermudah masuknya investor dan membantu mereka dalam berinvestasi.

Sementara itu Bupati Biak Numfor, Herry Naap mengatakan dalam kunjungan kali ini ia ingin menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat Kabupaten Biak Numfor yang dirangkum dalam program dan rencana kerja di tahun 2019. Ia juga menyampaikan kondisi-kondisi yang kerap dihadapi dalam pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, infrastruktur, pendidikan dan sumberdaya manusia yang ada di Biak Numfor.

“Kami adalah kabupaten kepulauan terluar dan masih menjadi bagian dari Indonesia yang berbatasan dengan Laut Pasifik. Kami minta kepada DPR RI, kalau boleh datanglah berkunjung ke Biak Numfor, untuk melihat realita kondisi yang kami hadapi. Sehingga aspirasi kami tersuarakan, karena kami juga memiliki hak yang sama sebagai warga Negara Indonesia,” pungkas Herry. ■ es/sf

# Kemitraan MKD - Penegak Hukum Berjalan Baik

**Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sarifuddin Sudding mengapresiasi kemitraan dan kerja sama yang telah berjalan baik antara penegak hukum, khususnya jajaran Polda Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dengan MKD DPR RI. Menurutnya, pola kemitraan dan kerja sama antara penegak hukum di daerah dengan MKD DPR RI sangat penting, mengingat Anggota DPR RI berasal dari seluruh daerah yang ada di Tanah Air.**



Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Sarifuddin Sudding.

“ Saya kira kemitraan yang di bangun MKD dengan institusi penegak hukum yang ada di berbagai daerah sangat penting. Karena 560 Anggota Dewan kan terdiri dari seluruh daerah yang ada di Nusantara. Makanya pola kemitraan dan kerja sama MKD dengan jajaran penegak hukum di daerah itu penting untuk dilakukan,” katanya usai Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara dengan Wakapolda Sulteng Aris Purnomo dan Kajati Sulteng Sampe Tuah di Gedung Pertemuan Polda Sulteng, Palu, Kamis (26/7).

Politisi Partai Hanura itu menambahkan, pola kemitraan yang terbangun selama ini cukup baik, sehingga perilaku-perilaku yang tidak pantas dan tidak patut yang dilakukan oleh Anggota DPR RI dapat dihindarkan. “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, MKD DPR RI selalu berkoordinasi dengan seluruh jajaran institusi penegak hukum,” tutur politisi yang juga Anggota Komisi III DPR RI itu.

Sarifuddin berharap, Anggota DPR RI ke depannya betul-betul profesional dalam melaksanakan tugasnya, memahami tugas dan fungsinya, serta tidak melakukan suatu perbuatan yang

Foto: Azka/hr

# Pemberantasan Narkoba Hadapi Banyak Tantangan Berat

**Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan bahwa kinerja petugas yang menangani persoalan narkoba belum berbanding lurus dengan apa yang telah dilakukan oleh mafia narkoba. Menurutnya, masih banyak kendala dan tantangan berat yang harus dihadapi.**

“ Oleh karenanya, Komisi III DPR meminta atensi atau perhatian yang besar dalam sektor penganggaran bagi lembaga terkait,” ucap legislator yang akrab disapa Habib itu saat Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (30/7).

Dikatakan politisi PKS itu, pihaknya berharap agar lembaga-lembaga pemerintah di daerah yang menjadi mitra kerja Komisi III DPR RI dapat bekerja secara maksimal dalam menangani masalah narkoba.

Pada kesempatan itu, Habib juga menyampaikan beberapa permasalahan klasik yang kerap dialami oleh Lembaga



Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi.

Pemasyarakatan (lapas) di Indonesia, yakni masalah pengendalian peredaran narkoba dari atau di dalam Lapas, persoalan *over capacity*, masalah makan, maupun masalah sarana dan prasarana.

“Peristiwa di Lapas Sukamiskin menjadi percontohan, bahwa sesungguhnya kejadian itu merupakan gunung es, dan (kejadian ini) bukan hanya terjadi di Sukamiskin, mungkin juga terjadi di lapas-lapas yang ada di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Habib menyampaikan bahwa hingga saat ini lapas seringkali menjadi narasumber suplai narkoba, selain itu ada pula persoalan yang terkait kemudahan akses masuknya alat komunikasi ke dalam lapas.

“Sementara pada lembaga Kejaksaan, ada masalah penting yang akan kita dalam yakni menyangkut masalah kasus tanah di lapangan udara di Makassar dan masalah korupsi di Kajati. Kita berharap dalam

Foto: Agung/hr



tidak patut dan tidak pantas di tengah-tengah masyarakat. Ia juga berharap, Anggota Dewan memahami norma-norma yang ada di masyarakat dan menjauhi perilaku yang tidak etis.

“Jangan merasa sebagai Anggota DPR RI bisa menggunakan kewenangan yang ada, dan melakukan intervensi kepada penegak hukum. Tetapi harus bagaimana kita membangun citra yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Saya kira Anggota Dewan jangan melakukan intervensi terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tindakan-tindakan seperti itu tidak dibenarkan,” tandas Sarifuddin.

Ia menambahkan, MKD melakukan sosialisasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan sejauh mana pelanggaran-pelanggaran etik yang dapat diproses di daerah. Ia juga memaparkan, saat ini MKD DPR RI sedang membuat MoU dengan Kepolisian dan Kejaksaan Tinggi. MoU yang tak lama lagi selesai dibuat itu berguna dalam penegakan etik di DPR RI. “MoU ini sudah hampir rampung. Nanti tinggal ditandatangani oleh Kapolri dan Kejaksaan Tinggi dengan MKD,” ujar politisi dapil Sulteng itu. ■ azk/sf

kunjungan fungsi pengawasan ini akan ada perbaikan kinerja pada mitra Komisi III,” tandas Habib.

Terkait masalah anggaran yang selalu menjadi keluhan para mitra kerja Komisi III DPR RI di daerah, Habib berkomitmen akan menjadikannya sebagai rekomendasi untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

“Kita akan memberi perhatian serius untuk menambah fasilitas-fasilitas (yang diperlukan) tersebut. Karena setiap kali Komisi III melakukan kunjungan kerja, kita juga selalu mempertanyakan apa yang menjadi kebutuhan dan kekurangan terkait masalah sarana dan prasarana pendukung kinerja bagi para mitra kerja kita di daerah,” papar Habib.

Habib juga sempat mengatakan bahwa Komisi III DPR RI merasa ada kejanggalan atas kasus losnya suplai narkoba dari pantauan aparat berwenang dalam jumlah yang cukup besar di Sulsel.

“Kita melihat, mengapa Badan Narkotika Provinsi (BNP) di Sulawesi Selatan sampai mengalami 190 kali lolos masalah narkoba, dan suplainya 4 kilogram perbulan. Ini menjadi catatan besar buat kita, apa yang sebenarnya terjadi,” pungkask politisi dapil Kalsel itu. ■ as/sf



Foto: Kresno/hr

Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mencoba alat pemadam karhutla Sambunesia Nozzle

## Komisi IV Apresiasi Pengendalian Karhutla oleh KLHK

**Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI mengapresiasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang telah bahu-membahu bersama TNI, Polisi dan pemerintah daerah dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.**

**H**al tersebut dinyatakan Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI melihat praktik pencegahan karhutla oleh Manggala Agni di Posko Pegayut, Kecamatan Pemulutan Induk, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Senin (30/7).

“Kami percaya di bawah Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya hal ini bisa teratasi. Kebakaran luar biasa tahun 2015 saja bisa teratasi, apalagi sekarang dengan bertambahnya pihak-pihak terkait yang ikut membantu dan dengan tambahan alat-alat pemadam produksi anak bangsa,” ujar Edhy.

Saat praktik pencegahan dan penanggulangan karhutla, didemonstrasikan juga alat penemuan baru dari dalam negeri yaitu Sambunesia Nozzle. Alat ini dapat membantu pemadaman api, khususnya untuk lahan gambut yang seperti diketahui sulit untuk dipadamkan.

Dalam tinjauan ini, Edhy mengatakan pihaknya memfokuskan pada persiapan Asian Games yang akan digelar di Palembang. Sehingga dikhawatirkan karhutla dapat mengganggu kelancaran gelaran tersebut. “Asian Games ini harus kita sukseskan dan tidak ada halangan sedikitpun. Semua pihak harus bersatu bahu membahu,” imbuh Edhy.

Dari sisi anggaran, politisi Partai Gerindra itu mengatakan sudah mengingatkan Kementerian Keuangan untuk menambah anggaran khusus untuk KLHK.

“Jangan sampai bencana karhutla sudah kejadian, baru anggaran muncul, yang penting antisipasi. Tidak hanya sampai disini, kami minta juga pencegahan melalui pengendalian citra satelit setiap hari dan pemadaman melalui pesawat yang kita belum punya,” tutup Edhy. ■ eno/sf

# SKP Merauke Harus Lindungi Sumber Daya Hayati Asli Indonesia

**Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Watimena memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau secara langsung kesiapan Stasiun Karantina Pertanian (SKP) Kelas I Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. SKP Merauke sebagai garda terdepan, diharapkan dapat melindungi sumber daya hayati asli Indonesia, baik dari penyalahgunaan rekayasa genetik, agensia hayati, kejahatan pencurian, perdagangan dan peredaran secara ilegal.**

Diketahui, SKP Merauke lokasinya sangat strategis dalam mencegah masuk, keluar, dan berkembangnya hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan ke dan dari wilayah lain dan negara lain seperti Australia, dan Timor Leste.

Menghadapi berbagai tantangan ke depan, kata Michael, SKP Merauke diharapkan juga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang berdampak pada sektor pertanian.

“Sehingga SKP wajib melakukan percepatan, efisiensi, efektifitas, dan transparansi agar di era bioteknologi seperti sekarang ini. sehingga peluang penyalahgunaan sumber daya alam

hayati menjadi senjata biologis atau *bioterrorism* dapat segera diantisipasi dengan tindakan nyata,” tutur Michael saat memimpin Tim Kunker Komisi IV DPR RI meninjau SKP Merauke, Papua, Senin (30/7).

Politisi Partai Demokrat ini pun mengingatkan perlunya tindakan yang bersifat preventif dan kuratif dalam mengontrol lalu lintas Hewan dan Tumbuhan, serta produk turunannya juga wajib dilakukan oleh SKP Merauke.

Diketahui, Indonesia merupakan Negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati terbesar setelah negara Brazil (*highest diversity*) untuk dapat dimanfaatkan secara lestari dan menjadi modal penting bagi pembangunan nasional diantaranya untuk

memenuhi pangan, pakan, dan energi serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan Karantina pun telah banyak melalui perubahan dan perkembangan lingkungan strategis yang sedemikian cepat dan dinamis dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Hal ini berdampak signifikan dalam penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, terutama laju arus perdagangan antar negara. Keterkaitan perdagangan dengan Karantina melibatkan ketentuan dan kesepakatan sanitary and phytosanitary (SPS) di bawah perjanjian World Trade Organization (WTO).

Terlebih lagi jika dikaitkan dengan Revisi Undang-Undang No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang sedang dibahas oleh Komisi IV DPR RI bersama pemerintah, yakni akan menekankan pada penyelenggaraan sistem karantina diintegrasikan dan dikoordinasikan dalam satu badan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Papua sebagai daerah yang kaya akan keanekaragaman hayati harus menjadi

perhatian khusus agar kelestarian alamnya tetap terjaga, ini yang menjadi tugas Stasiun Karantina Pertanian agar kedepan sumber daya hayati tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam kunjungan kerja yang diikuti sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI itu, turut mendampingi Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya (SDM) Pertanian Kementerian Pertanian Momon Rusmono dan Kepala Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani Badan Karantina Pertanian Agus Sunanto. ■ hs/sf



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Michael Watimena dan Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meninjau SKP Merauke



Foto: RIA/HR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto memimpin Kunjungan Kerja meninjau Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang

## Komisi V Pastikan Kesiapan Infrastruktur Asian Games di Palembang

**Perhelatan akbar olahraga Asian Games 2018 akan segera digelar di Indonesia. Pesta olahraga terbesar di Asia tersebut akan dilaksanakan tanggal 18 Agustus-2 September 2018 di DKI Jakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Untuk mensukseskan acara tersebut, Komisi V DPR RI terus melakukan pengawasan sejumlah pembangunan infrastruktur, guna mendukung gelaran Asian Games 2018.**

“Tujuan kunjungan kerja Komisi V ke Palembang ini untuk melihat seluruh pekerjaan infrastruktur yang nantinya akan mendukung penyelenggaraan Asian Games. Secara keseluruhan sudah baik, kami sangat mengapresiasi,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratto saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Senin (30/7).

Salah satu yang diapresiasi Komisi V DPR RI adalah fasilitas Light Rail

Transit (LRT) yang sudah beroperasi dengan baik. “Kami sudah coba naik LRT, nyaman dan sangat baik. LRT ini nantinya akan digunakan sebagai mobilisasi para pengunjung dari bandara ke Jakabaring dengan jarak 23,4 km dan estimasi waktu sekitar 45 menit, terdiri dari 13 stasiun,” jelasnya.

Sementara itu, infrastruktur hunian bagi atlet di Jakabaring juga turut menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Dijelaskan politisi Partai Demokrat itu, rumah susun (rusun) yang akan digunakan sebagai wisma atlet, terdiri dari 5 tower.

Tower 1-3 dapat dihuni oleh 729 atlet,

sementara tower 4 dan 5 dapat dihuni oleh 264 atlet. Bangunan ini juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti sambungan listrik, saluran air bersih, serta meubelair.

“Kenyamanan bagi atlet sangat penting, makanya kami lakukan peninjauan ke setiap ruang. Secara keseluruhan kami apresiasi, sudah baik. Semoga kenyamanan ini bisa mengantarkan atlet kita memberikan prestasi,” harap politisi dapil Jawa Barat itu.

Apresiasi juga turut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syaifuddin terhadap

pembangunan infrastruktur sebagai pendukung suksesnya penyelenggaraan Asian Games 2018.

“Palembang secara pengalaman memang sudah terbiasa menjadi tuan rumah *event* besar. Dan dalam penyelenggaraan Asian Games 2018 ini saya melihat Palembang sudah sangat siap,” jelas politisi Partai Golkar itu seraya meraya mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan moment tersebut sebagai pertumbuhan ekonomi.

Dalam kunjungan kerja tersebut juga turut hadir sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, diantaranya Yoseph Umarhadi (F-PDI Perjuangan), Mohammad Idam Samawi (F-PDI Perjuangan), Sadarestuwati (F-PDI Perjuangan), Muhidin M. Said (F-Golkar), Anthon Sihombing (F-Golkar), Sianitul Lativa (F-Golkar), Gatot Sudjito (F-Golkar), dan Ridwan Bae (F-Golkar).

Kemudian, Novita Wijayanti (F-Gerindra), Ida Bagus Putu Sukarma (F-Gerindra), Bahrum Daido (F-Demokrat), Jhoni Allen Marbun (F-Demokrat), Hartanto Edhie Prabowo (F-Demokrat), Bakri HM (F-PAN), Hana Gayatri (F-PAN), Intan Fitriani Fauzi (F-PAN), Mahfud Abdulrahman (F-PPS), Nurhasan Zaidi (F-PPS), Wardatul Asriah (F-PPP), Nurhayati (F-PPP), Sahat Silaban (F-NasDem) dan Syarif Abdullah Alkadier (F-NasDem). ■ rnm/sf



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir memimpin Tim Kunker Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur di Manokwari

Foto: Tiara/hr

## Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Rendani Terkendala Pembebasan Lahan

**Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir mendesak pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat perpanjangan landasan pacu Bandara Rendani di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang terkendala oleh pembebasan lahan masyarakat. Mengingat Bandara Rendani saat ini banyak dilintasi oleh pesawat berbadan lebar namun, tidak sebanding dengan panjang landasan pacu yang hanya berkisar 2000 meter. Minimal landasan pacu untuk pesawat berbadan lebar sepanjang 2500 meter.**

“Jika hal ini dibiarkan terus menerus tentunya akan membahayakan keselamatan penumpang. Maka dari itu, kami terus berupaya mendesak pemda agar mempercepat prosesnya. Namun sangat disayangkan sampai saat ini progresnya sangat lambat,” jelas Ibnu usai memimpin rapat antara Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dengan Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Bandara Rendani, Ditjen Perhubungan Udara, BMKG dan Basarnas di Bandara

Rendani, Manokwari, Papua Barat, Selasa (31/7).

Padahal lanjut politisi Partai Golkar itu, jika Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat benar-benar serius menangani persoalan tersebut, Komisi V DPR RI segera mendorong pemerintah pusat memutuskan anggaran terkait perpanjangan landasan pacu yang diikuti pula oleh rencana perluasan area terminal bandara.

“Memang saat ini yang menjadi

kendala adalah masalah pembebasan lahan masyarakat. Selain lahan milik pribadi, juga terdapat tanah milik adat. Jika ada hal-hal yang mungkin tidak bisa diselesaikan, mungkin bisa diselesaikan melalui cara adat. Bandara ini kan merupakan objek vital, maka hal ini harus cepat diselesaikan,” tandas politisi dapil Sulawesi Barat itu.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Ia menilai jika pemda gagal mengatasi pembebasan lahan dalam tenggat waktu tertentu, maka pemda dapat meminta diskresi kepada pemerintah pusat untuk bisa menyelesaikan persoalan.

“Namun sayangnya yang kita lihat pemda sampai saat ini belum berhasil dan diam saja. Berkali-kali saya datang ke sini, terakhir di tahun 2016 sampai sekarang, belum ada progres apa-apa. Saya kira ini harus jadi perhatian,” ingatkan politisi PKS itu.

Selain dengan pembebasan lahan masyarakat, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh, yaitu dengan memperpanjang landasan pacu pesawat ke arah laut. Namun Sigit mempersoalkan pengakuan Kepala UPBU Bandara Rendani yang mengatakan area laut di sekitar bandara tersebut terdapat palung, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukannya pembangunan.

Terkait palung itu kan bisa diukur dan dihitung berapa kedalamannya. Jangan hanya mengira-ngira saja palung itu dalam. Seandainya jika kedalaman palung tersebut cukup, nantinya bisa dibuatkan tiang-tiang di dalam laut. Sehingga penggusuran terhadap lahan warga tidak perlu dilakukan dan pembangunan landasan pacu dapat dengan cepat diselesaikan. Saya kira kerja sama antara pusat dan daerah perlu ditingkatkan lagi," imbuh politisi dapil Jatim itu.

Sebelumnya Kepala UPBU Bandara Rendani Manokwari Wahyu Anwar mengaku belum bisa menentukan batas waktu untuk pembebasan lahan guna perpanjangan landasan pacu bandara. "Jika pemda siap membebaskan lahan, maka kami pun juga siap melakukan pembangunan perpanjangan landasan pacu bandara," jelasnya.

Sementara terkait rencana pembangunan terminal baru bandara, Wahyu mengaku pihaknya sudah menyampaikan kepada Bupati Manokwari dan Gubernur Papua Barat soal rencana pembangunan terminal bandara yang lebih besar, karena letak bandara berada di ibu kota provinsi.

"Kendalanya adalah sebelum melakukan peletakan batu pertama pembangunan, harus buat jalan terlebih dahulu di pesisir untuk menghubungkan terminal lama dan baru. Karena posisi terminal baru berada di atas jalan, sehingga kalau bangun berarti jalan terputus," ujarnya.

Untuk itu, dirinya mengaku pihaknya sudah berupaya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manokwari dan Balai Jalan, sehingga diharapkan dibantu membuat jalan pengganti yang saat ini dipakai.

Kunjungan Kerja ini turut diikuti oleh sejumlah Anggota Komisi V DPR RI, diantaranya Rendy M. Affandy Lamadjido (F-PDIP), Hamka B. Kady (F-PG), Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra), Agung Budi Santoso (F-PD), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), Moh. Unais Ali Hisyam (F-PKB), Abdul Latief Hanafiah (F-PKB) dan Nur Yasin (F-PKB). ■ tra/sf



Foto: Singgih/hr

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung memimpin peninjauan ke Tahura Bukit Soeharto.

## Tahura Bukit Soeharto Harus Bebas Aktivitas Penambangan Ilegal

**Aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Provinsi Kalimantan Timur, menjadi sorotan Komisi VII DPR RI. Pasalnya Tahura Bukit Soeharto merupakan kawasan konservasi alam yang harus dilindungi dan bebas dari aktivitas penambangan ilegal.**

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung yang memimpin langsung peninjauan ke Tahura Bukit Soeharto meminta agar kawasan itu segera diberi tanda *police line* di lokasi penambangan ilegal tersebut. Dia menilai bahwa aktivitas itu sudah melanggar perundang-undangan dan harus diberi sanksi yang tegas.

"Kita mendapatkan informasi bahwa di Tahura Bukit Soeharto ada aktivitas *illegal mining*, dan setelah kita cek ternyata benar. Kita bersepakat bahwa itu harus di *police line*, jadi tidak boleh ada lagi aktivitas penambangan-penambangan di daerah tersebut," ungkap Tamsil usai peninjauan Tahura Bukit Soeharto di Kaltim, Selasa (31/7).

Politisi PKS itu menegaskan bahwa dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan ilegal di Tahura Bukit Soeharto sangat luar biasa, terutama kerusakan lingkungan di kawasan tersebut. "Aktivitas penambangan di Tahura ini harus kita hentikan dan tidak ada alasan untuk membiarkannya," tandasnya.

Lebih lanjut Tamsil meminta agar informasi terkait masih adanya dua perusahaan yang memiliki izin melakukan aktivitas penambangan di kawasan tersebut yang akan berakhir pada 2019, untuk segera dievaluasi dan dicek kebenarannya. Karena seharusnya di kawasan Tahura tidak boleh ada aktivitas penambangan.

Dalam sidaknya ke kawasan Tahura Bukit Soeharto, Komisi VII DPR RI melihat langsung adanya tumpukan batu bara, baik yang sudah dalam karung maupun yang masih nampak baru digali yang siap diangkut. Kondisi ini membuat Tahura Bukit Soeharto kian memprihatinkan. Sejak ditetapkan sebagai hutan konservasi pada era Presiden Soeharto 1989 silam, luasannya terus berkurang.

Kawasan ini seluas kurang lebih 68.000 hektar. Potensi batubara yang terkandung di dalamnya, membuat penambang tergiur untuk menggantinya. Lubang bekas galian tambang batubara dibiarkan menganga tanpa ada tanda-tanda kegiatan penanaman kembali. Padahal, dalam ketentuan perundang-undangan, harus melakukan penanaman kembali lokasi eks galian tambang.

"Kerusakan lingkungan di kawasan Tahura Bukit Soeharto nampak terlihat, kita telah bersepakat dengan mitra kita untuk menghentikan aktivitas penambangan di kawasan tersebut," tegas Tamsil yang diamini sejumlah Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR RI. ■ skr/sf

# Kinerja PLTMG Papua Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengatakan, kinerja Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) tidak berjalan secara maksimal karena aliran listrik yang berada di Papua belum merata hingga daerah pelosok. Pasalnya dari luas wilayah Papua dan Papua Barat yang mencapai 546.633 km<sup>2</sup>, baru sekitar 53,62 persen yang teraliri listrik.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam pimpin tinjauan ke PLTMG Papua

“Kita berharap nanti di bulan Oktober seperti yang mereka janjikan, semua desa sudah bisa menikmati listrik, karena PLTMG ini bagus dan ramah lingkungan. Semoga dapat berjalan sesuai rencana,” harap Ridwan saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI meninjau Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Jayapura, Papua, Selasa (31/7).

Dia juga menginginkan Program Papua Terang dapat berjalan segera, karena banyak masyarakat pedesaan yang ingin sekali rumahnya teraliri listrik. PLTMG juga harus memiliki terobosan terbaru dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Papua.

“Daerah Papua ini kan luas, penduduknya sedikit, jarak perumahannya jauh jauh, nah kalau kita menggunakan sistem jaringan listrik kan sangat mahal sekali. Harusnya bisa memanfaatkan tenaga air, tenaga surya atau bisa juga memakai kayu. Jangan pakai solar, karena sangat mahal. Kasihan masyarakat nanti,” jelas Ridwan.

Menurut politisi dari Fraksi Partai Golkar ini, meskipun baru berjalan

Foto: Jayadi/hr

# Kebun Raya Lemor Simpan Flora Endemik

**Kebun Raya (KR) Lemor di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menyimpan spesies flora endemik khas kawasan Sunda Kecil (NTB, NTT, Bali). Kekayaan tumbuhan endemik Sunda Kecil dikonservasi dengan baik oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) NTB di KR Lemor.**

KR Lemor menempati areal seluas 124,9 hektar dan akan dirilis pada 8 Agustus 2018. KR ini menambah jumlah KR di Indonesia yang berfungsi mengonservasi keanekaragaman tanaman khas Indonesia. Di KR Lemor ini ada anggrek endemik Lombok bernama *Vanda lombokensis* dengan daun bunga berwarna putih kecoklatan. Bahkan, KR Lemor juga menyimpan tanaman durian gundul yang juga khas Lombok.

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan, pihaknya sangat mendukung keberadaan KR Lemor untuk melestarikan berbagai spesies, tidak saja flora tapi juga fauna endemik setempat.

“Kebun Raya Lemor sudah lama diciptakan oleh masyarakat Lombok Timur dan menjadi satu-satunya kebun raya di NTB. Komisi VII berkunjung ke sini untuk melihat dari dekat sejauh mana penyelesaian pembangunan kebun raya ini sebelum di-launching,” katanya di sela-sela Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke KR Lemor, NTB, Senin (30/7).



Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi melihat spesies flora endemik di KR Lemor

Foto: Husen/hr

sekitar 50 persen, namun ia tetap memberikan apresiasi kepada PLTMG dan PLN yang sudah menjalankan pekerjaannya karena beberapa desa kita lihat sudah teraliri listrik dan berjalan dengan baik progresnya.

“Komisi VII akan terus mendorong agar program Papua Terang dapat berjalan dengan baik. Selain itu kami juga mendengar tadi mereka juga bekerja sama dengan 5 universitas yaitu Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung dan Universitas Cendrawasih. Masing-masing perguruan tinggi tersebut mengirimkan mahasiswanya untuk membantu memecahkan masalah pemerataan listrik tersebut,” tutur Ridwan.

Politisi dapil Jawa Timur itu menambahkan, permasalahan ini nantinya juga akan di selesaikan pada rapat di Komisi VII DPR RI dengan pihak-pihak terkait, dan segera dijadwalkan. Kunjungan kerja kali ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI, diantaranya Nazarudin Kiemas, Tony Wardoyo, Nawafie Saleh, Bambang Riyanto, Muhammad Yudi Kotoucky, Agus Sulistyono, dan Fery Kase. ■ **jay/sf**

Menurut politisi daerah pemilihan NTB ini, manfaat KR sangat jelas untuk jangka panjang, yaitu kelestarian lingkungan, arena bermain anak-anak, dan sebagai menimba pengetahuan flora fauna khas NTB.

“Anggrek Vanda kita minta dikembangkan dan disebar. Untuk infrastruktur kami coba perjuangkan lewat parlemen ke pemerintah pusat, agar Kementerian PUPR membanggarkan infrastruktur untuk kebutuhan sebuah KR,” imbuh Kurtubi.

Di hadapan petugas KR Lemor, politisi Partai NasDem ini juga segera menyumbangkan sepeda motor roda tiga sebagai pengangkut sampah yang masih kurang. Bahkan, ia juga akan membantu merealisasikan sumur bor untuk KR Lemor.

Sebelumnya, otoritas KR Lemor menyampaikan, sebagai taman konservasi, saat ini Lemor membutuhkan sumur bor dan infrastruktur jalan untuk menunjang pemeliharaan dan akses masuk. ■ **mh/sf**

# Persiapan Asian Games Berimbas pada Ekonomi Sumsel

**Perkembangan perekonomian di Sumatera Selatan triwulan I tahun anggaran 2018 terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Realisasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebesar 5,89 persen diperkirakan karena adanya penyelenggaraan Asian Games di Palembang. Komisi XI DPR RI berharap, positifnya pertumbuhan ekonomi ini merata ke seluruh Sumsel.**

“Ini karena ada stimulasi dari kegiatan Asian Games yang menyerap banyak dana, konsumsi naik, dan investasi naik,” ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bank Indonesia Sumsel, BPS, BPKP, dan BPK RI di Gedung Bank Indonesia, Palembang, Sumsel Senin (30/7).

Namun politisi PDI-Perjuangan itu mengingatkan bagaimana ke depan pemanfaatannya dari semua barang-barang modal yang diimpor dan dibeli yang saat ini telah diinvestasikan, setelah Asian Games kegiatan hiruk pikuk di tahun 2018 ini usai.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Bertu Merlas menyayangkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara Kota Palembang dengan daerah sekitarnya. Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, wilayah di sekitar Palembang juga harus mendapat perhatian.

“Ibarat manusia, Palembang ini wajah yang bersolek, tapi seharusnya badan tangan kaki juga ikut dirawat. Jangan hanya Palembang yang dibangun, tetapi begitu keluar kota sedikit jalanan infrastruktur sudah memprihatinkan,” ungkap politisi dapil Sumsel II itu.

Sementara itu, mengenai pengelolaan Kompleks Olahraga Jakabaring dan Light Rail Transit (LRT), Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sumsel Yohanes H Toruan menyatakan bahwa Kompleks Olahraga Jakabaring adalah hasil pembangunan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada tahun 2004 lalu.



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Prakosa

Kemudian dimanfaatkan untuk Sea Games tahun 2011 dan sekarang memuncak untuk Asian Games tahun 2018. Kemudian rencananya akan terus dipergunakan untuk acara serupa.

“Sampai dengan tahun 2020 sudah dipesan untuk penyelenggaraan lima pertandingan olahraga internasional maupun nasional, yaitu dayung tingkat dunia, voli pantai tingkat dunia, menembak, tenis dan bulutangkis Super Series,” papar Yohanes. Sehingga dengan demikian sampai 2020 pasti sudah ada kegiatan.

Mengenai pengoperasian LRT, salah satu langkah yang diupayakan setelah pelaksanaan Asian Games 2018, pengelolaan LRT Sumsel akan tidak lagi mengandalkan subsidi melalui APBN.

“Adanya kekhawatiran bagaimana LRT digunakan dengan tarif yang terjangkau dan kelancaran pasokan listrik dalam menjalankannya memang ada, tapi kami bertekad pasti mampu melaksanakannya, seperti tantangan pada acara-acara sebelumnya,” tegas Yohanes. ■ **ran/sf**

# Komisi IX Temukan Pasien BPJS Beli Obat Sendiri



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri memimpin peninjauan ke RSUD Lakipadada, Tana Toraja

Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI menemukan pasien peserta BPJS Kesehatan Kelas 3 yang tengah mendapat pelayanan di RSUD Lakipadada, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, membeli obat sendiri. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri yang memimpin Tim Kunjungan Kerja, mengaku kaget dengan adanya temuan itu.

“Kami mengunjungi RSUD Lakipadada di Tanatoraja ini tujuannya untuk mengetahui secara langsung bagaimana kondisi rumah sakit, infrastruktur dan fasilitas, serta pelayanan khususnya pada pasien Kelas 3. Namun di sini kami kaget menemukan pasien yang menebus obat sendiri di luar, padahal pasien tersebut peserta BPJS Kelas 3 yang tengah mendapat layanan perawatan di rumah sakit,” ungkap Syamsul, di sela-sela peninjauan RSUD Lakipadada, Tana Toraja, Sulsel, Senin (30/7).

Foto: Ayu/hr

# Komisi IX Pertanyakan Defisit Anggaran BPJS Kesehatan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan defisit anggaran BPJS Kesehatan pada tahun 2018. Menurut Saleh, BPJS Kesehatan setiap tahunnya terus mengalami defisit keuangan. Dari laporan Menteri Kesehatan (Menkes) tahun 2017, BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar Rp9 triliun.

Demikian dikatakannya usai memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI Bupati Jember dan BPJS Kesehatan Provinsi Jawa timur di Pendopo Wahyu Wibawa Graha, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Senin (30/7).

“Defisit 2018 belum dilaporkan. Dari laporan 2017 yang kita anggarkan



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dan Tim Kunker meninjau pasien di RSD dr. Soebandi Jember

sebesar Rp25 triliun. Bulan September lalu Menteri Kesehatan sudah melaporkan kepada kita ada defisit sekitar Rp9 triliun.

Berarti ada Rp34 triliun anggaran BPJS Kesehatan untuk biaya mereka yang memperoleh kartu BPJS Kesehatan gratis,”

Foto: Arief/hr

Pasalnya, lanjut Syamsul, menurut ketentuan, peserta BPJS Kesehatan mendapatkan pelayanan di RS tidak boleh dipungut biaya apapun, apalagi menebus obat. Kenapa? Karena pihak RS dengan BPJS Kesehatan sudah menandatangani kontrak kerja sama. Sehingga semua tindakan medis sesuai dengan petunjuk atau rekomendasi dari dokter itu harus dilayani oleh RS termasuk obat-obatan.

“Tapi tadi ada pasien yang mengaku membayar atau membeli obat di luar. Obat itu dikeluarkan berdasarkan resep dokter. Memang alasannya obat yg dimaksud tidak ada di RS alias harus beli di luar. Kalau itu terjadi, seharusnya RS yang membelikannya ke luar, bukan pasien sendiri yang membelinya,” jelas politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Ditambahkan Syamsul, ke depan pihaknya akan kembali membahas hal tersebut kepada Menteri Kesehatan dan jajarannya. Agar memberikan pembinaan ke RS yang memberikan pelayanan dengan BPJS Kesehatan.

Meski demikian, menurut Syamsul secara umum pelayanan RSUD Lakipadada yang merupakan RS dengan Tipe C ini sudah cukup baik. ■ ayu/sf

kata Saleh.

Politisi PAN itu menambahkan, harus ada kearifan dari pemerintah, BPJS Kesehatan, serta masyarakat untuk sama-sama berpikir, jangan sampai terjadi defisit. Sehingga pemerintah tetap melangsungkan BPJS kesehatan ini.

“Program BPJS ini sangat dibutuhkan bahkan lebih penting dari infrastruktur. Kalau infrastruktur hanya orang tertentu yang menggunakannya. Tetapi kalau BPJS Kesehatan, orang miskin dan orang kaya semua membutuhkan. Oleh karena itu harus kita pertahankan,” tegas Saleh.

Terkait pelayanan BPJS Kesehatan kepada pesertanya, politisi dapil Sumut itu menambahkan, yang paling penting untuk diperhatikan adalah pendataan peserta BPJS Kesehatan harus divalidasi, agar tepat sasaran.

“Dalam pantauan kita, bahwa data penerima BPJS Kesehatan yang gratis ada sebagian tidak valid. Karena ada orang yang kelihatannya mampu, justru dapat gratis. Sebaliknya ada orang yang tidak mampu, malah tidak dapat. Ini berarti ada sesuatu yang salah dalam BPJS Kesehatan itu,” tutup Saleh. ■ afr/sf

# Komisi IX Soroti Ketenagakerjaan PT. Berau Coal Industri

**Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI meninjau PT. Berau Coal Industri di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam pertemuan yang diisi dengan dialog bersama dengan pihak manajemen perusahaan, dia menanyakan soal kepesertaan BPJS, baik Ketenagakerjaan atau Kesehatan.**

“Dalam konteks kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, tadi dilaporkan belum keseluruhannya, dari sisi prosentasi tenaga kerja yang ada maupun dari hal-hal yang lain,” kata Adang di Politeknik Sinar Mas Berau Coal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Senin (30/7).

Berkaitan dengan upah pekerja, pihaknya menemukan sejauh ini belum ada keluhan yang berarti dari para serikat pekerja yang ada di PT. Berau Coal Industri. “Dari sisi upah, nanti dari pihak-pihak terkait, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten agar ditindak lanjuti, supaya perlindungan pada tenaga kerja sesuai dengan amanat undang-undang,” tandas Adang.

Selain itu yang tidak kalah penting berkaitan dengan serapan tenaga kerja dari masyarakat lokal. Menurut Adang, persoalan ini merupakan isu kerawanan sosial yang harus jadi perhatian. Meskipun demikian, dia menyadari kebutuhan atas lapangan pekerjaan mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Pertimbangan serapan tenaga kerja lokal juga memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan.

“Dilihat dari sisi kerawanan sosial, yakni serapan pekerja dari tenaga kerja lokal, tadi disampaikan ada sekitar 52 persen. Saya melihat Indonesia ini luas yang membutuhkan kerja. Bahkan dari seluruh Indonesia ada di sini. Dan ini juga mungkin terkait dengan kompetensi yang siap dipakai oleh perusahaan Berau Coal,” jelas Adang.

Politisi dari Fraksi PKS ini sempat memberikan apresiasi terkait dengan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) berupa Politeknik Sinar Mas Berau Coal. Keberadaan BLK ini mampu



Anggota Komisi IX DPR RI Adang Sudrajat.

Foto: Eko/hr

mendidik masyarakat lokal memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

“Saya melihat dari BLK yang menjadi politeknik mampu mendidik agar pekerja memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” imbuh politisi dapil Jabar itu.

Berkenaan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR), dia meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten maupun Provinsi bisa mengawal dan mengawasi peruntukan dana CSR yang murni untuk masyarakat. Menurutnya, dana tanggung jawab sosial perusahaan itu harus murni untuk kepentingan masyarakat. Bukan malah dialokasikan ke sektor yang bisa justru menguntungkan kembali untuk perusahaan.

“Aturannya enam persen dari keuntungan, tapi kan mereka melihat dari penjualan tiap satu ton ada 25 sen. Itu pun harus yang murni untuk masyarakat bukan yang memberikan keuntungan balik untuk perusahaan. Jadi harus murni untuk masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat,” papar Adang. ■ eko/sf

# Komisi X Apresiasi Penggunaan Muatan Lokal pada Kurikulum Pendidikan Riau

**Tim Kunjungan Kerja Komisi X ke Provinsi Riau yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati memberikan apresiasi atas penggunaan bahasa daerah sebagai muatan lokal pada kurikulum pendidikan di Provinsi Riau. Menurut Reni, hal itu sebagai upaya pelestarian budaya Daerah.**



Foto: Guntur/hr.

Tim Kunker Komisi X ke Provinsi Riau dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati

“Salah satu usaha Pemerintah Provinsi Riau melestarikan budayanya melalui pendidikan bahasa sudah tepat,” apresiasi Reni saat memimpin pertemuan antara Tim Kunker Komisi X DPR RI dengan Plt. Gubernur Riau beserta jajaran, Ketua PGRI, Dewan Pendidikan, PHRI, dan ASITA Riau, di Kantor Gubernur Riau, di Pekanbaru, Riau, Senin (30/7).

Reni menjelaskan, muatan lokal saat ini adalah sebagian daripada Kurikulum

Berbasis Budaya yang memberikan penguatan *character building* dalam sistem kurikulum di Indonesia. apalagi, pemerintah pusat melalui Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memberikan pelajaran muatan lokal dalam rangka melestarikan budaya daerahnya masing-masing.

“Muatan lokal di sini sebenarnya bukan hanya bahasa atau budaya, tapi juga olahraga dan seni. Bahasa daerah hanya salah satunya,” ujar politisi Partai

Persatuan Pembangunan dan dapil Jawa Barat itu.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Popong Otje Djundjunan mengatakan, bahasa daerah Riau sebagai muatan lokal bagi pendidikan Provinsi Riau adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi budaya Melayu. Karena Bahasa Melayu yang digunakan sebagai dasar bahasa persatuan, Bahasa Indonesia.

“Salah satu cara memelihara dan mengembangkan budaya itu sendiri adalah keberpihakan dunia pendidikan pada muatan lokal. Ada muatan nasional, ada muatan lokal. Ada Bangsa Indonesia, ada suku bangsa Riau, ada suku bangsa Sunda, ada etnis China, ini semua jadi fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Ceu Popong.

Politisi Partai Golkar ini juga setuju bahwa berkaitan dengan muatan lokal ini ada lima hal yang jadi batasan sebagai pemersatu NKRI yang tidak bisa ditawar dan tidak ada kompromi, yaitu satu Filosofi Negara Pancasila, Satu Bangsa Indonesia, Satu Bahasa Indonesia, Satu Lagu Indonesia Raya, dan Satu Bendera Merah Putih.

“Pendidikan itu sebenarnya harus sentralistis seperti tentara atau kejaksaan, karena pemerintah pusat saat ini hanya bisa menganjurkan ke daerah. Karena kalau pendidikan tidak dimaknai dengan keahlian, maka hasil pendidikan dan anak didiknya akan salah asuhan,” tandas politisi dapil Jawa Barat itu. ■ gd/sf

## Komisi VIII Terima Usulan Bandara Raden Inten II Dijadikan Embarkasi Haji

**Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Lampung mendapatkan usulan agar Bandara Raden Inten II bisa dijadikan embarkasi Haji. Pasalnya, selama ini masyarakat Lampung yang akan berangkat Haji harus terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang terlebih dahulu.**



Foto: Azka/hr.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin kunjungan kerja ke Lampung

# Komisi XI Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak Provinsi Banten

**Komisi XI DPR RI mendorong jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Provinsi Banten meningkatkan penerimaan pajak untuk membantu pemasukan negara, sehingga bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).**

**D**emikian salah satu poin yang disampaikan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan saat memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan Kanwil Provinsi Banten, BPK, BPKP, Kanwil DJP Banten, dan jajarannya di Kota Serang, Banten, Senin (30/7).

Politisi Partai Demokrat ini mengingatkan bahwa adanya program pengampunan pajak (tax amnesty) dari pemerintah pusat, seharusnya mampu meningkatkan penerimaan pajak di Provinsi Banten secara signifikan. Namun hasil laporan yang dipaparkan Kanwil DJP Banten masih belum cukup menggembirakan. Tentu hal ini harus ditelusuri apa yang menjadi kendala di lapangan.

“Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI juga bermaksud mendapatkan data dan informasi terkini mengenai kondisi ekonomi terkini di wilayah Banten yang meliputi perkembangan kondisi capaian penerimaan pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, hasil pemeriksaan BPK serta peran BPKP

dalam mengawal penerimaan anggaran daerah Banten,” ungkap Marwan dalam sambutannya.

Legislator dapil Lampung II ini juga menegaskan bahwa kedatangan Komisi XI DPR RI ke Provinsi Banten juga dalam rangka ingin mengetahui gambaran pelaksanaan tugas instansi-instansi pemerintah pusat yang ada di daerah serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

“Berbagai kendala yang dihadapi di lapangan silahkan nanti kita diskusikan dan akan menjadi bahan masukan bagi

kami saat rapat kerja dengan kementerian terkait. Dan komitmen kami untuk mendorong mitra kerja agar memperoleh hasil maksimal dalam mencapai target penerimaan negara,” pungkaskan Marwan.

Sementara itu Kepala Kanwil DJP Banten Catur Rini Widosari mengatakan program pengampunan pajak untuk wilayah Provinsi Banten hanya mampu menambah 2-5 persen penerimaan pajak, karena kebanyakan Wajib Pajak (WP) pengampunan pajak berada di pusat, walaupun punya pabrik di Banten.

“Sementara untuk program ekstensifikasi juga menjadi program prioritas Kanwil DJP Banten dalam menambah jumlah WP dan menjerang wajib pajak baru,” imbuh Catur Rini.

Turut serta dalam Kunjungan Kerja ini antara lain Melchias Markus Mekeng (Ketua Komisi XI/Golkar), Maruarar Sirait (PDI-Perjuangan), Marsiaman Saragih (PDI-Perjuangan), Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar), Ahmadi Noor Supit (Golkar), Alamuddin Dimiyati Rois (PKB), Jhonny G Plate (NasDem) dan Donny Imam Priambodo (NasDem). ■ oji/sf



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan memimpin Tim Kunjungan Kerja ke Banten

**M**arwan menilai, hal tersebut akan melelahkan bagi jemaah yang akan beribadah Haji, apalagi sebagian besar jemaah Haji sudah manula, dan mempunyai resiko tinggi penyakit. Pihaknya pun menyambut baik usulan itu.

“Saya berharap pada tahun 2019 Bandara Raden Inten II sudah bisa menjadi embarkasi Haji. Karena satu embarkasi di Provinsi Lampung sudah di atas tujuh ribu jemaah, itu sudah mencapai persyaratan,” kata Marwan setelah memimpin pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja VIII DPR RI dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Taufik Hidayat beserta jajaran, di Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Jumat (27/7).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menilai, usulan menjadikan

Bandara Raden Inten II Lampung ini sebagai embarkasi Haji, tidak akan menghadapi hambatan yang rumit untuk mengusulkan itu, sekalipun itu bukan menjadi wilayah kerja Komisi VIII DPR RI.

“Kita akan merekomendasikan kalau mereka membuat surat. Kita akan resmi surat lewat Pimpinan DPR RI. Karena selain menjadikan bandara embarkasi, ini bisa menjadi pintu destinasi wisata. Sehingga tidak lagi harus masuk lewat Jakarta terlebih dahulu, bisa jadi Singapura langsung ke Lampung. Karena Provinsi Lampung juga memiliki spot wisata yang banyak,” jelas Marwan.

Politisi dapil Sumatera Utara itu pun menambahkan bahwa indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung sangat

rendah untuk di wilayah Sumatera. Selain itu, tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

“Provinsi Lampung ini sebenarnya daerah yang sangat strategis, tetapi mengapa IPM-nya rendah, tingkat kemiskinannya pun tinggi, dan juga kekerasan anak dan perempuan yang tinggi,” katanya seolah bertanya.

Kunjungan kerja ini juga diikuti sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI, diantaranya Itet Tridjajati Sumarjanto dan Hamka Haq dari F-PDI Perjuangan, Adi Putra Darmawan Tahir dan Markus Nari dari F-Golkar, Evi Zainal Abidin dan Nanang Samodra dari F-Demokrat, Bambang Budi Susanto (F-PAN), An'im Falachuddin Mahrus (F-PKB), Iqbal Romzi (F-PKS), dan Titik Prasetyowati Verdi (F-Nasdem). ■ azk/sf



Foto: Erlangga/hr

Tim Kunker Komisi X DPR RI rapat dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel dan mitra kerja terkait

## Legislator Dorong Pemerintah Perkuat SDM Pariwisata Sulsel

**Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengaku perlu adanya penguatan pada sektor sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata di Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, hal ini harus secepatnya ditangani oleh instansi terkait, mengingat besarnya tuntutan masyarakat di bidang tersebut.**

Hal itu ia ungkapkan saat pertemuan antara Tim Kunker Komisi X DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulsel, Dinas Pariwisata Provinsi Sulsel, serta mitra kerja terkait di Makassar, Sulsel, Senin (30/7).

Politisi Partai Golkar ini meminta pihak-pihak terkait untuk bergerak ekstra cepat karena kebutuhan akan SDM di Provinsi Sulsel dengan berbagai tingkatan ini sangat kurang. Dengan tegas ia mendorong Dinas Pariwisata Sulsel juga berbagai mitra untuk menyiapkan perekrutan terhadap kekurangan SDM tersebut.

“Kebutuhan akan SDM adalah hal yang utama, baik SDM tingkat bawah sampai tingkat atas sekalipun. Penataan dan pengelolaan ataupun menyiapkan SDM di bidang pariwisata diharapkan bisa lebih cepat akselerasinya. Harapannya adalah bisa lebih cepat juga merespons kebutuhan-kebutuhan wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara,” ujar Ferdi, sapaan akrabnya.

Untuk perekrutan tersebut, politisi dapil Jawa Barat XI ini meminta agar Dinas Pariwisata juga memperhatikan standar kualitas setiap calon rekrutan. Ia menyarankan agar pihak dinas pariwisata

bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi vokasi dan bidang pariwisata agar mendapatkan rekrutan yang berkualitas.

“Selain itu, kami juga membahas mengenai sertifikasi terhadap profesionalitas standar mengenai ketenagakerjaan di bidang pariwisata. Alhamdulillah beberapa hal secara kegiatan dan program sudah ada sinergi antara mitra di lingkungan Komisi X yaitu di SMK vokasi bidang pariwisata dan Kemenristekdikti di bidang perguruan tinggi pariwisata dengan Kementerian Pariwisata,” tutupnya. ■ eps/sf

# Komisi X Tinjau Pariwisata Berau

**Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meninjau beberapa potensi pariwisata dan pusat kebudayaan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Dalam tinjauan pertama ke Bumi Batiwakkal itu, Komisi X DPR RI melihat langsung Museum Gunung Tabur dan Keraton Sambaliung.**

perhatian pihaknya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Berau, Mappasikra Mappaselleng mengaku memang belum seluruhnya obyek wisata di Berau terekspos dan dikenal hingga ke luar daerah, bahkan luar negeri. “Masih banyak obyek-obyek wisata di kampung-kampung yang belum terekspos oleh media-media lokal maupun media luar,” ungkapnya.

**H**etifah mengatakan, kedatangan Tim Kunker

Komisi X DPR RI ini bertujuan untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi di daerah paling utara Kalimantan Timur ini. Khususnya yang berkaitan dengan pendidikan, pariwisata dan ekonomi kreatif, kebudayaan dan olahraga, yang merupakan bidang Komisi X DPR RI.

“Dalam kesempatan ini juga Komisi X DPR RI turut mengajak Badan Ekonomi Kreatif dan mitra kerja terkait lainnya, supaya lebih terekspos lagi situasi di Kabupaten Berau ini,” ungkap Hetifah di sela-sela peninjauan, Senin (30/7).

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menerangkan, sebelumnya kunjungan kerja Komisi X DPR RI didominasi ke ibu kota provinsi dan daerah sekitarnya. Sehingga dengan kunjungan ke Kabupaten Berau ini, merupakan sebuah upaya lebih untuk mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat Bumi Batiwakkal yang jauh dari ibu kota provinsi.

“Kami fokus utamanya dalam kunjungan ini adalah pariwisata, karena kami juga sudah mendukung seperti gelaran Maratua Jazz. Tapi nantinya apa lagi yang perlu kami lakukan, akan dihasilkan dari pertemuan dan peninjauan, dan kami siap tindaklanjuti tentunya,” pungkasnya.

Hetifah menambahkan, Kaltim



Foto: Iwan/hr

Tim Kunker Komisi X dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meninjau museum Gunung Tabur

merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang memiliki potensi budaya dan pariwisata yang menarik. Kaltim memiliki obyek wisata beragam, baik wisata alam, agrowisata maupun wisata budaya. Antara lain, seperti wisata hutan tropis yang lebat dengan keanekaragaman jenis flora dan fauna liar dikawasan Taman Nasional Kutai atau keindahan bawah laut di Pulau Derawan.

“Potensi ini tentunya memerlukan strategi pengembangan dan promosi potensi wisata dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim,” imbuah politisi dapil Kaltim ini, sembari mengatakan, terkait permasalahan infrastruktur dan mahalnya transportasi seperti harga tiket pesawat juga menjadi

Menurutnya, belum banyak tereksposnya obyek wisata di kampung-kampung itu kendalanya adalah akses menuju obyek wisata tersebut. Salah satunya air terjun di Kampung Inaran, Kecamatan Sambaliung. Akses jalan menuju air terjun tersebut sangat sulit dan akan menyulitkan wisatawan. Apalagi saat ini masih menggunakan jalur logging perusahaan kayu.

“Semoga Kepala Kampung yang ada obyek wisatanya mau membuatkan jalan atau akses menuju, supaya memudahkan wisatawan,” terangnya sembari menambahkan, potensi wisata di Pulau Derawan juga belum seluruhnya terekspos. ■ iw/sf

# Komisi XI Apresiasi Pengendalian Inflasi Bali

**Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Bali dan lembaga sektor ekonomi dan keuangan di Bali yang cukup bagus dalam mengendalikan inflasi dan peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, capaian ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain.**



Foto: Nadya/hr

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno

sepertinya ada kesulitan-kesulitan. Tapi saya kira kalau ada kesungguhan, pasti ada jalan keluarnya. Sekarang saya hanya minta keseriusannya,” ungkapnya.

Menurut Tutik, alasan yang disampaikan dalam menyelesaikan permasalahan itu adalah regulasi, namun hal tersebut bisa dicarikan solusi yang lain. Misalnya, mulai dari mengatur sampah-sampah rumah tangga lebih dahulu. Tutik menginginkan jangan setelah ada kesulitan seperti itu seolah tidak ada jalan keluar.

“Saya hanya menginginkan keseriusan dan adanya jalan keluar. Karena pariwisata di Bali ini tidak tergantung pada SDA-nya, tapi panorama dan ritual di Bali juga. Kalau Bali ditumpuk dengan sampah, nyaris akan ditinggalkan dari pariwisatanya,” pintanya.

Terakhir, politisi Partai Demokrat itu meminta kepada Pemprov Bali untuk segera menguraikan kemacetan di Bali secara mutlak, kemudian sampah juga harus betul-betul dituntaskan. ■ ndy/sf

Hal itu diungkapkan Soepriyatno usai memimpin rapat kerja Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Bali, Kementerian Keuangan, Dirjen Bea Cukai, BPS, BPKP, BPK, dalam Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Senin (30/7).

“Komisi XI rapat dengan BPS, BPK, BPKP dan sebagainya dalam konteks untuk melihat kinerja Pemerintah Provinsi Bali. Dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Bali terbilang cukup bagus, inflasinya bagus, kemudian APBD-nya meningkat, jadi saya kira ini perlu ditiru oleh provinsi-provinsi lain,” ungkap Soepriyatno.

Politisi Partai Gerindra itu menilai, penyaluran kredit di Bali cukup bagus. Non Performing Loan (NPL) juga relatif masih di bawah tingkat nasional, dan penyaluran KUR juga cukup bagus.

“Tidak ada kendala-kendala yang sangat serius yang akan terjadi di Bali. Dan semoga semuanya, dan kondisi-kondisi yang ini bisa bermanfaat untuk masyarakat,” harap politisi dapil Jawa Timur itu.

Sementara itu Anggota Komisi XI DPR RI Tutik Kusuma Wardhani berharap, adanya rapat dengan seluruh jajaran Pemprov Bali dan mitra kerja Komisi XI DPR RI di Bali ini, dapat mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di Pemprov Bali. Sehingga DPR RI dapat mensinergikan dengan baik program-program pusat agar dapat diimplementasikan dengan baik di daerah, khususnya Bali.

Terkait dengan inflasi di Bali, Tutik yang berasal dari daerah pemilihan Bali mengungkapkan, Kabupaten Buleleng menjadi salah satu daerah yang mampu mengendalikan inflasi di Bali.

Ia menjelaskan, di Buleleng sendiri banyak sekali potensi-potensi yang belum digarap secara optimal oleh pemerintah daerah. Sehingga, dirinya meminta Pemprov Bali untuk dapat mensinergikan program kerja yang ada di provinsi ke kabupaten dan kota di seluruh Bali, khususnya di daerah-daerah yang terjadinya inflasi tertinggi.

Selain persoalan tersebut, hal lain yang menjadi sorotan Tim Kunker Komisi XI DPR adalah kemacetan dan sampah di Bali. Menurut Tutik, ini perlu penanganan yang sangat serius. “Kalau tadi disampaikan

# Komisi VIII Apresiasi Kinerja BPBD Bali

**Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid mengapresiasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali. Kinerja mitra kerja Komisi VIII DPR RI ini tanggap menangani bencana alam Gunung Agung di Bali dan melakukan antisipasi tanggap darurat bencana.**



Foto: Andri/hr

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid

# Tingkatkan Tali Silaturahmi, PIA DPR Gelar Halal Bihalal dan Pengajian

**Bulan Syawal sudah berlalu, namun hal itu tidak menghalangi Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI untuk menggelar acara halal bihalal sekaligus pengajian bulanan. Acara ini dijadikan momentum untuk meningkatkan tali silaturahmi dan kebersamaan.**



Foto bersama PIA DPR RI

DPR RI, juga akan digelar donor darah yang dibuka untuk umum.

“Selain itu, kami juga akan menggelar bakti sosial di Sulawesi, dan mendirikan perpustakaan umum di sebuah daerah di Jawa Barat. Kami juga akan mengunjungi sekaligus memberikan santunan ke panti jompo, namun lokasinya belum kami tentukan bersama,” papar Lenny.

Ditambahkan Wakil Ketua PIA DPR RI Ista Agus Hermanto dalam halal bihalal yang mengambil tema “Halal Bihalal dan Pengajian, Momentum Meningkatkan Tali Silaturahmi dan Meningkatkan Indahnya Kebersamaan” itu, PIA DPR RI juga mengundang ustaz KH. Endang Husna, yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Nurmedina, Pondok Cabe Tangerang Selatan, untuk memberikan tausiyah.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksanaan Halal Bihalal dan Pengajian PIA DPR RI Letty Roem Kono bersyukur acara tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Padahal persiapannya tidak lebih dari tiga hari. Namun berkat kekompakan seluruh panitia di bawah koordinasi ketua panitia pelaksana tentunya, acara tersebut berjalan sesuai yang diharapkan.

“Awalnya, rencananya acara ini akan digelar pada Agustus mendatang, tapi karena bapak-bapak (Anggota DPR RI, red) pada Agustus sudah masuk masa reses, dimana kami istri-istrinya terkadang juga ikut mendampingi suami ke dapil, maka acara halal bihalal PIA ini dimajukan jadi hari ini. Jadi persiapannya tidak lebih dari tiga hari,” pungkas Letty. ■ ayu/sf

Sebenarnya secara informal beberapa diantara kami sudah saling bertemu pasca Lebaran. Namun memang baru hari ini kami menggelar halal bihalal secara resmi untuk seluruh Anggota PIA DPR RI. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan tali silaturahmi dan kembali merangkai indahna kebersamaan,” ujar Ketua Umum PIA DPR RI Lenny Bambang Soesatyo di Ruang Serbaguna Masjid Baiturrahman DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (26/7).

Ditambahkan Wakil Ketua PIA DPR RI Grace Fadli Zon bahwa selama empat tahun bersama-sama dengan seluruh Anggota PIA, halal bihalal ini menjadi momentum untuk meningkatkan kembali tali silaturahmi di

tengah tahun politik, plus di akhir tahun kebersamaan mereka.

“Alhamdulillah, walau berbeda-beda fraksi dan partai, PIA DPR RI tetap kompak dan solid. Masing-masing di antara kami menghargai perbedaan. Hal itu tidak kami runcingkan, namun malah membuat kami semakin solid untuk bersama-sama menjalankan beberapa sisa program yang telah disusun bersama,” tambah Grace.

Adapun program PIA DPR RI yang masih tersisa untuk tahun ini salah satunya adalah perayaan HUT DPR RI pada September mendatang, digelar dalam bentuk *family gathering* yang melibatkan seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak-anak. Selain itu, masih dalam rangkaian HUT

Saya mengapresiasi kinerja BNPB selama penanggulangan masalah bencana alam, tidak hanya di Bali, namun di berbagai tempat di Indonesia,” kata Sodik memimpin Tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi VIII DPR RI mengunjungi kantor BPBD Bali, Senin (30/7).

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, dalam menangani bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang terjadi saat ini, BPBD Bali telah mengalihkan logistiknya untuk membantu penanggulangan bencana gempa dan membantu korban gempa NTB.

Lebih lanjut, Sodik meminta pemerintah dan BNPB dan BPBD untuk membekali masyarakat untuk tanggap bencana dalam penyelamatan diri.

“Jika sudah terjadi bencana alam (erupsi), para pengungsi sudah benar-benar siap dalam menyelamatkan diri. Untuk itu perlu pelatihan-pelatihan dan edukasi kepada masyarakat untuk persiapan jika benar-benar Gunung Agung erupsi,” jelas Sodik.

Politisi daerah pemilihan Jawa Barat itu mengimbau pemerintah dan instansi terkait untuk menangani rehabilitasi korban trauma bencana alam.

“Sedangkan soal bantuan untuk bencana alam, BNPB perlu adanya manajemen audit, agar bisa dihitung standar angka dalam melakukan bantuan dan sumbangan untuk kejadian penanggulangan bencana alam,” tandasnya.

Di sisi lain, Sodik meminta BNPB bekerja sama dengan pihak terkait, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta pihak terkait lainnya dalam menangani pengungsi bencana alam.

■ man/sf

# Nilai Pancasila Harus Ada Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, Pancasila telah memperoleh legitimasi yuridis yang kuat. Namun terdapat indikasi yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum benar-benar di dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan.



Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Johnson Rajaguguk

Foto: Chasbi/hr

Hal tersebut antara lain dapat dilihat secara yuridis dari hasil uji materi peraturan perundang-undangan dan secara sosiologis adanya peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Menyikapi realitas ini, Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Kadir Johnson Rajaguguk menilai perlu dilakukan pembenahan sistem peraturan perundang-undangan, agar produk yang dihasilkan memiliki filosofi hukum yang berkualitas, dan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menyesuaikan dinamika global.

Hal itu ia ungkapkan saat memberikan sambutan pada Simposium Nasional bertema “Institusionalisasi Pancasila dalam Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan” di

Jakarta, Senin (30/7). Gelaran BK DPR RI bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini digelar di Jakarta, 30 Juli - 1 Agustus 2018.

“Kegiatan simposium ini dimaksudkan untuk merespon kebutuhan. Karena sistem peraturan perundang-undangan, bahkan tidak sedikit undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) serta mengabaikan prinsip hierarki, selalu mewarnai peraturan undang-undang,” kata Johnson dalam sambutannya.

Atas dasar ini, kegiatan simposium menjadi penting untuk mengupayakan bagaimana mendefinisikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan dalam evaluasi peraturan perundang-undangan, serta parameter apa yang harus digunakan dalam pembentukan dan evaluasi

peraturan perundang-undangan tersebut.

Persoalan menginstitusionalisasikan Pancasila dalam pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, merupakan tugas semua komponen bangsa dan lembaga negara, termasuk DPR RI dan BPIP. Terkat hal ini dibutuhkan instrumen dan parameter untuk menilai dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang akan dan telah dibuat apakah bertentangan dengan Pancasila atau tidak. ■ apr/sf

## FOTO KEGIATAN



Tim Bagian Penerbitan Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI melakukan monitoring pendistribusian Buletin dan Majalah Parlementaria ke Perpustakaan Universitas Bangka Belitung dan Perpustakaan STAIN Syekh Abdurrahman Siddik, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, (31/7) Foto : Tasya/hr



Foto: Eka hindra/hr

Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir bertukar cenderamata dengan Kepala BNNP Jambi.

## Jambi Peringkat Empat Nasional Penyalahgunaan Narkoba

**Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Jambi menemukan fakta, Jambi menduduki peringkat empat nasional dalam penyalahgunaan narkoba. Anggota Komisi III DPR RI Junimart Girsang berharap semua pihak, khususnya masyarakat dan dibantu unsur Kepolisian agar berperan aktif dalam mensosialisasikan tentang bahaya narkoba. Karena bahaya dari narkoba itu sendiri menjadi ancaman generasi penerus bangsa.**

“Berdasarkan laporan yang diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi, penanganan bahaya narkoba masih mengalami berbagai kendala dan keterbatasan, baik keterbatasan dari sisi anggaran, SDM maupun dari sisi fasilitas lainnya,” kata Junimart, di sela-sela pertemuan Tim Kunker Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir dengan Kepala BNNP Jambi Abdul Razak beserta jajaran serta mitra kerja Komisi III DPR RI lainnya, di Jambi, Senin (30/7).

Sementara itu, Kepala BNNP Jambi Abdul Razak mengatakan bahwa Jambi kini dalam kondisi darurat narkoba. Padahal beberapa tahun yang lalu, tingkat penyalahgunaan narkoba di Jambi sudah bisa ditekan, bahkan hingga ke peringkat puluhan secara nasional.

Namun saat ini, menurut Razak, penyalahgunaan narkoba di Jambi sudah sangat kronis. Dikatakan Razak, sepanjang tahun 2017 lalu tercatat sebanyak 53.177 penyalahgunaan narkoba dengan prevalensi 2,02 persen. Akibatnya, Jambi menempati peringkat empat nasional.

“Tingkat penyalahgunaan narkoba di Jambi kembali mengkhawatirkan. Ini tergambar dari hasil penilaian nasional terkait banyaknya penyalahgunaan narkoba di tiap daerah dan kini Jambi berada di posisi empat nasional untuk penyalahgunaan narkoba,” tegas Razak.

Mendapati temuan itu, Ketua Tim Kunker Kahar Muzakir mengatakan, segala masukan yang disampaikan oleh mitra kerja Komisi III DPR RI di Jambi ini akan dijadikan sebagai masukan bagi DPR RI. Hal ini guna mendorong adanya peningkatan anggaran maupun fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh mitra kerja Komisi III DPR RI di daerah.

“Oleh karenanya, dari pertemuan ini kami berharap akan adanya sinergitas yang terbangun antar mitra kerja Komisi III. Sehingga berbagai permasalahan yang ada, seperti masalah peredaran narkoba tersebut bisa segera mendapatkan solusinya,” kata Kahar. ■ hr/sf



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

# mau motor jaman now? IKUTI LOMBA KRITIK TERBAIK DPR

KIRIM MEME & ESSAY

MEME (gambar, karikatur, video)

ESSAY maksimal 500 kata

MASA PENGIRIMAN KARYA: 19 APRIL - 15 AGUSTUS 2018

PENGUMUMAN 29 AGUSTUS 2018

PEMENANG UTAMA: MOTOR JAMAN NOW

Juara I Rp 10 juta, Juara II Rp 7 juta, Juara III Rp 5 juta

KIRIM KE:

SAAT PENGUMUMAN  
DILANGSUNGKAN  
LOMBA STAND UP COMEDY



[lombakritikterbaikDPR@gmail.com](mailto:lombakritikterbaikDPR@gmail.com)



[lombakritikterbaikDPR@yahoo.com](mailto:lombakritikterbaikDPR@yahoo.com)



[@LombaKritikTerbaikDPR](https://www.instagram.com/LombaKritikTerbaikDPR)



[@LombaKritikDPR](https://twitter.com/LombaKritikDPR)



[@lombakritikterbaikDPR](https://www.facebook.com/lombakritikterbaikDPR)